Jurnal BPPK Volume 10 Nomor 1 Tahun 2017 Halaman 22-37

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MELONJAKNYA PENYERAPAN ANGGARAN QUARTAL IV INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN)

Rahadi Nugroho[a], Salman Alfarisi[b],
[a]PKN STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Indonesia, Email: rnugroho83@gmail.com
[b] Pusdiklat Pajak, Jl. Sakti Raya No.1, Kemanggisan, Jakarta Barat, Indonesia, Email: salman.afrs@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
5 April 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 November 2017

KATA KUNCI:
anggaran,
penyerapan,
perencanaan,
pengadaan barang dan jasa,
pengeluaran pemerintah.

ABSTRAK

The effect of public expenditure on economic depend also on the time when the particular expenditure really spend. Thus, budget expenditure's schedule must be complied. In Indonesia there was a phenomena that public expenditures usually soar in second semester, especially on last quarter of the budget year. The aim of this research is to find out the determinant of public expenditure. The result shows that budget planning, implementation of budget planning, and coordination are significant factor of public expenditure. However, procurement and human resources are not significantly affect public expenditure.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi juga tergantung ketepatan waktu pengeluaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyerapan anggaran yang terjadwal. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah penyerapan anggaran yang meningkat drastis di semester 2 khususnya triwulan terakhir tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran instansi pemerintah dengan menggunakan metode persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah. Sedangkan faktor pengadaan barang dan jasa dan faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan dalam penyerapan anggaran pemerintah adalah melesetnya target penyerapan anggaran terutama di semester I sehingga terjadi penumpukan belanja pemerintah di triwulan akhir terutama belanja modal. Sebagian besar Satuan Kerja (satker) sangat rendah tingkat penyerapan anggarannya di awal tahun anggaran, kemudian terjadi peningkatan pada triwulan berikutnya dan baru terjadi peningkatan secara signifikan di triwulan terakhir. Padahal Satuan Kerja telah berkomitmen untuk merealisasikan anggaran secara merata sepanjang tahun sebagaimana terdapat halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sebagai contoh lonjakan tersebut dapat dilihat di pola penyerapan belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2014 sebagaimana grafik I.1.

Pola penumpukan pencairan anggaran ini terjadi juga di Kementerian-Kementerian tak terkecuali di instansi tempat penulis bekerja yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. Penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal di BPPK pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki pola penyerapan yang serupa yaitu menumpuk di triwulan IV. Berdasarkan Tabel III.1 diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan akhir triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 47,4% sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 39,15%. Pada tahun 2012 sampai dengan akhir triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 60,24% sedangakan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 40,49%. Pada tahun 2013 sampai dengan akhir triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 53,53% sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 37,34%. Pada tahun 2014 sampai dengan akhir

triwulan III penyerapan anggaran belanja barang sebesar 59,34% sedangakan untuk penyerapan anggaran belanja modal sebesar 51,99%.

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya.

Grafik 1.1 Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Modal Pemerintah Pusat 2014

Sumber: diolah dari Laporan Realisasi APBN 2014

Tabel 1.1 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja BPPK 2011-2014

Tahun	Triwulan	Jenis Belanja					
		Barang	%	% kumulatif	Modal	%	% kumulatif
2011	I	18,516,131,228	7.16	7.16	6,885,070,615	6.22	6.22
	II	59,224,288,323	15.74	22.90	17,975,232,079	10.02	16.24
	III	121,319,501,360	24.24	47.14	43,817,592,864	22.91	39.15
	IV	227,917,079,966	40.13	87.27	116,943,468,764	54.62	93.77
2012	I	39,063,717,654	12.71	12.71	2,263,226,627	4.72	4.72
	II	126,328,458,612	28.40	41.11	9,444,250,757	14.97	19.69
	III	183,941,252,980	19.14	60.24	20,226,484,801	20.80	40.49
	IV	281,081,747,229	32.59	92.83	54,466,598,725	57.51	98.00
2013	I	38,945,451,200	11.83	11.83	5,610,990,944	6.09	6.09
	II	133,114,292,238	28.62	40.45	18,477,888,169	13.94	20.03
	III	177,301,255,427	13.08	53.53	34,633,875,826	17.31	37.34
	IV	368,923,898,338	43.83	97.36	97,644,535,961	61.13	98.47
2014	I	45,954,974,006	11.66	11.66	8,873,559,010	11.37	11.37
	II	138,965,567,104	18.60	30.27	20,825,936,248	15.36	26.73
	III	250,404,693,776	29.07	59.34	37,453,615,528	25.25	51.99
	IV	417,074,362,518	38.43	97.77	74,612,046,299	47.13	99.11

Sumber : diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPPK

Sebagaimana penelitian Siswanto dan Rahayu (2010) yang menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penyebab utama rendahnya penyerapan belanja pada kementerian dan lembaga (K/L) yaitu permasalahan terkait internal K/L, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi. Sejalan dengan hal tersebut Herriyanto (2012) juga menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan, administrasi, sumber daya manusia (SDM), Dokumen Pengadaan dan Ganti Uang Persediaan. Sementara itu Sulaeman, Hamzah dan Priyanto (2012) menyatakan bahwa perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi penyerapan anggaran khususnya di Kementerian Keuangan diikuti oleh permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, dan permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja khususnya belanja barang dan belanja modal di instansi pemerintah dengan lokus BPPK. Penelitian ini mengombinasikan beberapa penelitian sebelumnya, sebagian penelitian ini akan menggunakan variabel hasil dari penelitian Herriyanto (2012) serta penambahan variabel Permasalahan Koordinasi Dengan Sektor Atau Instansi Lain dari penelitian Sulaeman, Andy Hamzah, dan Priyanto (2012).

2. KERANGKA TEORITIS

Supranggono (2009, 90) menyatakan bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh terhadap pengelolaan fungsi perbendaharaan dan ekonomi makro. Dalam melakukan cash management, Pemerintah dalam hal ini Bendahara Umum Negara (BUN)/Menteri Keuangan dituntut untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien yaitu dengan menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan penempatan uang/investasi jangka pendek, mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, meminimalkan idle cash, mempercepat penyetoran penerimaan negara, dan melakukan pembayaran tepat waktu. Dalam pelaksanaannya BUN memerlukan berkoordinasi dengan K/L. Bentuk koordinasi tersebut salah satunya adalah rencana penarikan pada DIPA halaman III K/L dijadikan sebagai dasar BUN dalam mempersiapkan kebutuhan dana. Karena BUN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana yang dibutuhkan K/L pada waktu yang tepat, hal ini berpengaruh pada strategi yang digunakan BUN. Pada saat BUN kekurangan kas maka BUN akan melakukan pinjaman dari dalam/luar negeri, pinjaman dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), atau surat berharga lainnya. Dalam pelaksanaan ini akan timbul

cost of borrowing dan cost administration of payment process ditambah pemerintah harus membayar bunga dan instrument pembiayaan lainnya sehingga apabila K/L tidak dapat melakukan realisasi penyerapan sesuai yang dijanjikan pada rencana penarikan maka biaya-biaya tersebut akan tetap dibayar.

Kepastian waktu dalam melakukan pengeluaran sangat penting, Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi (1999, 149) menyatakan bahwa untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, maka otoritas untuk melakukan pengeluaran harus diberikan pada Kementerian teknis tepat waktu. Selanjutnya Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi (1999, 150) juga menyatakan bahwa kesuksesan dalam melaksanakan anggaran disebabkan oleh banyak faktor, seperti kemampuan dalam penyesuaian terhadap perubahan di ekonomi makro dan kemampuan internal pengguna anggaran dalam bidang pelaksanaan anggaran. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran terutama adalah kebijakan internal organisasi dan tingkat kesiapan perangkat organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan.

Sophian (2014, 3) menjelaskan masih terdapat kelemahan yang masih dijumpai terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diantaranya adalah pada tahap perencanaan masih dijumpai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berisi rencana pengadaan barang yang tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan instansi. Misalnya barang/jasa yang sangat diperlukan untuk menunjang kinerja instansi tidak tercantum dalam jumlah yang memadai dalam RKA/KL sementara barang/jasa yang lainnya tersedia dalam jumlah yang melimpah.

Siswanto dan Rahayu (2010) melakukan penelitian terhadap rendahnya penyerapan belanja atas tujuh K/L terbesar pengelola belanja menggunakan Analisis Deskriptif. Dari hasil penelitian ini diperoleh empat faktor penyebab utama rendahnya penyerapan belanja yaitu permasalahan terkait internal K/L, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi. Miliasih (2011) melakukan penelitian terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja satker K/L T.A. 2010 di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru menggunakan Analisis Deskriptif tabel analisis dengan Cross Tabulation. Dari hasil penelitian ditemukan penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker yaitu permasalahan terkait proses realisasi anggaran, permasalahan terkait kebijakan teknis, dan permasalahan budaya pengelola anggaran di satker. Herriyanto (2012) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran satuan kerja K/L di wilayah Jakarta menggunakan Analisis Faktor Eksploratory dengan 30 variabel awal. Dari hasil analisis faktor dihasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan.

Sulaeman, Hamzah, dan Priyanto (2012) melakukan penelitian terhadap penyerapan anggaran di Kementerian Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini menggunakan variabel perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh, permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian serta permasalahan otoritas dan sistem anggaran dengan Analisis Faktor dan Analisis Jalur. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi serapan anggaran di Kementerian Keuangan diikuti oleh permasalahan kebijakan, kinerja, dan koordinasi dengan sektor atau instansi lain, dan permasalahan kelemahan struktural dan sistemik dari kementerian.

Akadira (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan. Pengawasan yang dilakukan perlu dilakukan sejak awal perencanaan untuk membantu mendeteksi lebih dini terhadap kemungkinan kegagalan yang ada dan ini mampu memperbaikinya. Pelaporan memainkan peranan penting pula untuk mengetahui jumlah penyerapan anggaran yang ada, pelaporan yang baik dapat mengakomodasi penyerapan keuangan dan informasi keberhasilan suatu kegiatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sampel Penelitian dan Teknik pengumpulan data

Lokus penelitian ini adalah BPPK, salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pada satuan kerja BPPK termasuk Pejabat Perbendaharaan. Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran sedangkan Pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran yaitu Kepala Bidang/Kepala Bagian/Pejabat Eselon III, Kasubbag/Kasubbid/Pejabat Eselon IV, Pejabat Pengadaan serta Staf Pengelola Keuangan. Dari 132 kuesioner yang disebar baik secara manual maupun online kepada seluruh satker BPPK didapatkan sebanyak 83 responden, namun terdapat 2 responden melakukan dua kali input dan 1 responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap sehingga jumlah sampel yang layak uji adalah 80 responden atau sebesar 60,61%.

Kuesioner terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian pertama berisi pertanyaan tentang identitas umum responden, bagian kedua berisi pertanyaan pilihan/tertutup yang berjumlah 32 pertanyaan, bagian ketiga yang berisi pertanyaan terbuka tentang faktor dan kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran berdasarkan pendapat responden. Pertanyaan tertutup berupa daftar pertanyaan untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dari satker dengan menggunakan skala likert dengan lima pilihan. Sementara itu dalam pertanyaan terbuka, responden mengisi jawaban dalam kolom kosong apabila terdapat permasalahan yang tidak tercantum dalam pertanyaan tertutup.

3.2. Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK didasarkan pada kerangka penelitian sebagaimana gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

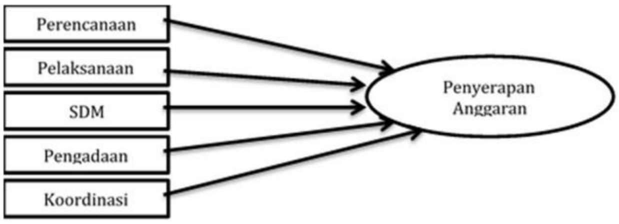

a. Faktor Perencanaan (X1).

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator sebanyak tujuh pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012) dan Sulaeman (2012).

b. Faktor Pelaksanaan Anggaran (X2).

Walaupun sudah direncanakan dengan baik tetapi jika dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala yang mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal maupun tidak sesuai rencana sebelumnya maka realisasi anggaran juga sangat mungkin akan tidak tepat waktu. Kendala yang sering terjadi adalah revisi anggaran, kelengkapan dokumen pembayaran, dan keterlambatan penagihan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak tujuh pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) (X3).

Kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam ketepatan penarikan dana instansi pemerintah. Selain itu, seringnya mutasi pegawai bagian keuangan sebuah instansi pemerintah juga mengakibatkan pekerjaan penarikan dana tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pegawai baru belum memahami peraturan-peraturan keuangan negara sehingga ada delay yang diakibatkan proses belajar pegawai baru. Variabel SDM ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak enam pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012).

d. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa (X4).

Proses pengadaan yang sering terkendala karena proses lelang ulang, tidak ada yang penyedia yang ikut lelang, kesulitan dalam menentukan Harga Perolehan Sendiri (HPS) dan barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi juga merupakan faktor yang menentukan realisasi pengeluaran anggaran. Pengadaan Barang dan Jasa ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak tujuh pertanyaan.

e. Faktor Permasalahan Koordinasi Dengan Sektor Atau Instansi Lain (X5).

Pemilihan faktor Permasalahan Koordinasi

Dengan Sektor Atau Instansi Lain sebagai variabel penelitian dikarenakan BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam menjalankan tugasnya program dan kegiatan yang direncanakan BPPK dapat ditentukakan juga oleh kebijakan dari intansi lain (stakeholder BPPK) sehingga koordinasi dengan sektor lain sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan. Faktor-faktor yang berasal dari permasalahan koordinasi dengan berbagai sektor, berkaitan dengan permasalahan koordinasi dengan berbagai sektor dan institusi lain maka muncul beberapa isu, di antaranya permasalahan koordinasi proyek dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak tiga pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Sulaeman, Hamzah dan Priyanto (2012).

3.3. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator pertanyaan sebanyak dua pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Sulaeman, Hamzah, Priyanto (2012) yaitu terkait besarnya serapan dan waktu serapan anggaran.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian, selanjutnya penelitian ini mengajukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e$$

dengan hipotesis yang ada dalam penelitian ini yaitu :

H1: Faktor Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

H2: Faktor Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

H3: Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

H4: Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

H5: Faktor Permasalahan Koordinasi Dengan Instansi Lain berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

H6: Faktor Perencanaan, Faktor Pelaksanaan Anggaran, Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Pengadaan Barang dan Jasa serta Faktor Permasalahan Kebijakan, Kinerja, dan Permasalahan Koordinasi Dengan Instansi Lain secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

Program komputer yang akan digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 2013. Aplikasi microsoft excel 2013 ini digunakan dalam mengolah data untuk pengujian kaliberasi kuesioner, analisis deskriptif data primer, sampai dengan pembuatan tabel maupun bagan. Selain Microsoft Excel 2013, penelitian ini juga menggunakan aplikasi SPSS For Mac Versi 21.0. Aplikasi SPSS (Statistical Package for Social Science) 21.0 digunakan dalam menganalisis data primer hasil kuesioner untuk pengujian validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik deskriptif

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata variabel perencanaan (X1) adalah sebesar 3,6135 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,100 pada item Q5 (lampiran I) yaitu terkait selalu ada perubahan rencana/rancangan kegiatan saat kegiatan/proyek sedang berjalan. Rata-rata variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) adalah sebesar 3,6520 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,038 pada item Q11 (lampiran I) terkait DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata variabel Sumber Daya Manusia (X3) adalah sebesar 3,5406 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,750 pada item Q18 (lampiran I) terkait pemberian reward and punishment tidak berjalan dengan baik. Rata-rata variabel Pengadaan Barang dan Jasa (X4) sebesar 3,1463 merupakan

variabel yang memiliki mean paling rendah di antara variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini, artinya dapat disimpulkan secara deskriptif responden memiliki persepsi ragu-ragu bahwa variabel pengadaan barang dan jasa berepengaruh terhadap penyerapan anggaran. Rata-rata variabel Permasalahan Koordinasi dengan Instansi Lain (X5) adalah sebesar 3,6083 artinya dapat disimpulkan secara deskriptif sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa variabel permasalahan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,775 pada item Q28 (lampiran I) terkait Sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga.

Sedangkan untuk variabel Serapan Anggaran sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa besar serapan anggaran sudah cukup baik (item Q31 dengan nilai rata-rata 3,563) namun ragu-ragu terkait waktu serapan anggaran sudah cukup baik sesuai dengan rencana dan tidak menumpuk di akhir tahun (item Q32 dengan nilai rata-rata 3,100).

Tabel 4.1 Ringkasan Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan	80	2.17	4.67	3.6135	.61868
Pelaksanaan Anggaran	80	2.00	4.67	3.6520	.52322
SDM	80	2.00	4.75	3.5406	.66732
PBJ	80	1.00	4.71	3.1463	.70197
Koordinasi	80	1.67	5.00	3.6083	.83451
Serapan Anggaran	80	2.00	5.00	3.4813	.64848
Q31	80	1.0	5.0	3.563	.8692
Q32	80	1.0	5.0	3.100	.9757

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan korelasi antar skor masing-masing item pernyataan dengan skor total item dalam satu variabel. Nilai r hitung dihasilkan dari Pearson Correlation pada uji korelasi bivariat akan dibandingkan dengan r tabel dengan nilai signifikansi α = 5%. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka item pernyataan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item pertanyaan dikatakan tidak valid. Sampel (n) dalam penelitian ini sebanyak 80 dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan df=n-2 (df=78) maka r tabel adalah 0,220 (r tabel dikutip dari lampiran di buku Ghozali 2013). Butir pernyataan yang valid dengan nilai r hitung lebih besar dari 0,220 dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, sedangkan butir pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari data yang akan diolah untuk pengujian selanjutnya. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas pada Lampiran II memperlihatkan dari total 32 item pernyataan yang diuji sebanyak 31 item dinyatakan valid dengan nilai r hitung lebih dari r tabel yaitu 0,220 namun terdapat 1 item pernyataan yang tidak valid yaitu item Q8 terkait SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan nilai r hitung (Pearson Correlation) item Q8 sebesar 0.213 lebih rendah daripada r tabel (df=78) sebesar 0.220.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Banyak metode yang digunakan dalam penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah koefisien keandalan (Cronbach Alpha). Suatu konstruk atau variabel dikatakan realibel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas data yang dilakukan dengan SPSS 21, pada Tabel 4.2 secara keseluruhan variabel nilai koefisien keandalan (Cronbachh's Alpha) menunjukkan angka 0,884. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliable (handal). Selain itu, variabel-variabel secara individu juga memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih tinggi dari 0,60 dengan nilai terendah pada variabel Sumber Daya Manusia (X3) sebesar 0,634. Sehingga secara individu juga variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	n	Reliabilitas
Perencanaan (X_1)	0.727	7	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X_2)	0.710	6	Reliabel
Sumber Daya Manusia (SDM) (X_3)	0.634	6	Reliabel
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (X_4)	0.853	7	Reliabel
Koordinasi dengan Instansi Lain (X_5)	0.867	3	Reliabel
Serapan Anggaran (Y)	0.773	2	Reliabel
Keseluruhan Variabel	0.884	31	Reliabel

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menganalisis grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selanjutnya pengujian normalitas juga menggunakan normal probability plots, jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Dari hasil grafik histogram Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa grafik mengikuti garis kurva normal

berarti data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Walaupun ada sedikit yang melenceng namun tidak jauh dari garis distribusi normal.

Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas

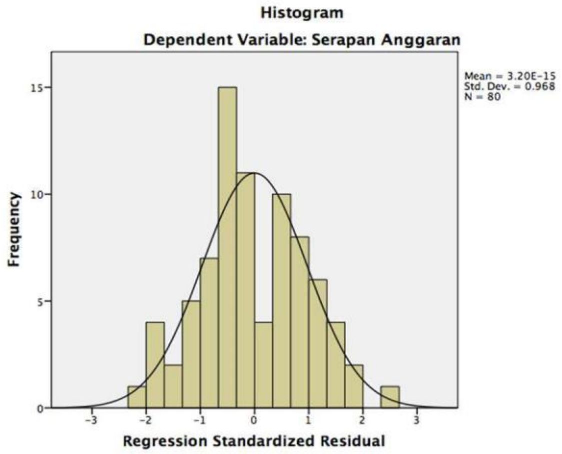

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value. Batas dari tolerance value adalah > 0,10 atau nilai VIF < 10. Apabila nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa angka tolerance dari variabel bebas Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, SDM, PBJ dan Koordinasi mempunya tolerance value > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas (dependen).

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Perencanaan	.513	1.951
Pelaksanaan Anggaran	.564	1.772
SDM	.781	1.281
PBJ	.763	1.311
Koordinasi	.811	1.234

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.3.3. Uji heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian terdapat pada Gambara 4.1.

Gambar 4.1 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

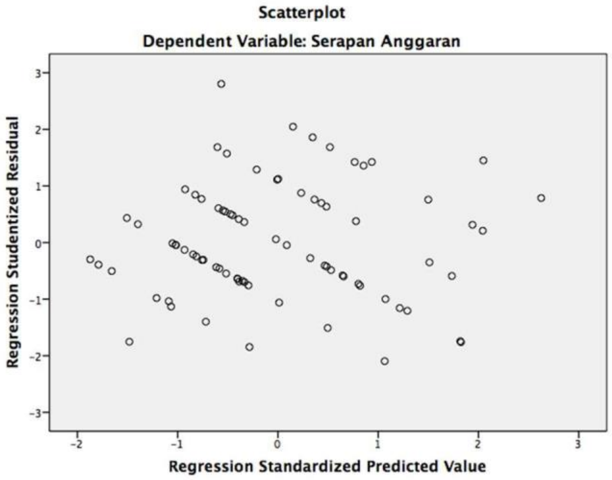

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik yang menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian

Hasil pengujian sebagaimana Tabel pada menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.2 Hasil uji Hipotesis

Model Dependent Variable: Serapan Anggaran (Y)	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.210	.395		14.939	.000
Perencanaan (X1)	-.568	.109	-.399	-3.424	.001
Pelaksanaan Anggaran (X2)	-.342	.123	-.358	-3.226	.002
SDM (X3)	-.024	.082	.143	-.1518	.133
PBJ (X4)	-.046	.079	.045	-.476	.636
Koordinasi (X5)	-.233	.064	-.219	-2.370	.020

Model persamaan regresi :
$Y = 7,210 + (-0,399)X_1 + (-0,358)X_2 + 0,143X_3 + 0,045X_4 +(-0.219)X_5 + 0,395$ $R^2 = 0,652$

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

Artinya hipotesis H6 dalam penelitian ini dapat diterima yaitu faktor perencanaan, faktor pelaksanaan

anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan kebijakan, kinerja, dan permasalahan koordinasi dengan instansi lain secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Selain itu, variabel perencanaan, pelaksanaan anggaran, SDM, PBJ dan Koordinasi dapat menjelaskan perubahan tingkat serapan anggaran sebesar 65,2%, sedangkan 34,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	28.242	5	5.648	30.633	.000[b]
Residual	13.645	74	.184		
Total	41.888	79			

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21

4.4.1. Hipotesis H1 Faktor Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor perencanaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel perencanaan menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan semakin buruk maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut. Sebagaimana Schiavo-Campo, Salvatore dan Tommasi (1999) menyatakan bahwa anggaran dengan perencanaan yang baik dapat saja dilaksanakan secara buruk, namun anggaran yang direncanakan secara buruk tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012) yang menyatakan bahwa faktor permasalahan dalam perencanaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Menurut responden permasalahan dalam perencanaan yang paling tinggi adalah terkait dengan persiapan perencanaan kegiatan serta kegiatan yang sering berubah-ubah pada saat sedang berjalan. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Sebagaimana hasil pengamatan penulis bahwa sebagian besar anggaran belanja yang ada di BPPK adalah berupa belanja barang yang salah satu outputnya adalah kediklatan (jumlah peserta diklat). Perencanaan dalam diklat dimulai dengan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilakukan pada stakeholder. Selama ini perencanaan kegiatan (diklat) masih belum sejalan dengan perencanaan penganggarannya karena proses penyusunan anggaran sudah dimulai sejak awal tahun sebelumnya sedangkan perencanaan kegiatan dalam hal ini hasil AKD baru diperoleh pada akhir tahun sebelumnya sehingga penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja (money follow function) masih belum efektif.

Permasalahan lain yang terjadi dalam perencanaan adalah adanya tambahan pagu karena Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dari hasil pengamatan penulis selama tahun 2014 terdapat 5 satker BPPK yang mendapatkan ABT. Satu satker mendapatkan ABT pada Triwulan III sedangkan 4 satker mendapatkan ABT pada Triwuan IV. ABT yang baru disetujui pada akhir tahun anggaran mengakibatkan penyerapan anggaran akan menumpuk di akhir tahun anggaran. Dengan metode costing yang ada sampai dengan saat ini masih memungkinkan adanya sisa anggaran yang cukup signifikan sehingga apabila sisa anggaran tambahan tersebut diketahui pada akhir tahun anggaran maka akan sulit untuk direalokasi.

4.4.2. Hipotesis H2 Faktor Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor pelaksanaan anggaran terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel pelaksanaan anggaran menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran adalah pemenuhan kelengkapan dokumen tidak tepat waktu serta keterlambatan proses penagihan dan pembayaran. Dari hasil jawaban responden pada pertanyaan terbuka dapat disimpulkan beberapa penyebab keterlambatan penagihan yaitu pertama pihak penyedia barang dan jasa yang terlambat melakukan penagihan padahal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sudah diingatkan oleh PPK untuk mengajukan dokumen tagihan, kedua pihak penyedia barang dan jasa tidak mengetahui format dokumen tagihan sebagai syarat pembuatan surat permintaan pembayaran sehingga dokumen yang dibuat oleh pihak penyedia barang dan jasa harus diperbaiki yang ketiga adalah kurangnya pemahaman dari bidang lain (pelaksana kegiatan) dalam hal mekanisme pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

Selain itu adanya addendum/perubahan kontrak turut menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyerapan anggaran. Sesuai pasal 87 dan 91 Perpres 54/2010 addendum kontrak diperbolehkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; mengubah jadwal pelaksanaan. Addendum kontrak sering terjadi terutama pada pengadaan konsumsi dan laundry peserta diklat, karena perubahan jadwal diklat yang sering dan realisasi peserta diklat yang tidak selalu sesuai dengan rencana dapat menyebabkan adanya addendum kontrak.

4.4.3. Hipotesis H3 Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor Sumber Daya Manusia tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sulaeman, Hamzah, dan Priyanto (2012) yang menyatakan Sumber Daya Manusia tidak menjadi permasalahan dalam penyerapan anggaran. Sumber daya manusia yang ada saat ini sudah memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Namun berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka, yang jadi permasalahan dalam SDM bukanlah kompetensi melainkan jumlah SDM yang terbatas mengakibatkan pegawai merangkap banyak pekerjaan sehingga banyak pekerjaan yang terlamabat diselesaikan dan pada akhirnya dapat juga menghambat dalam pelaksanaan anggaran.

4.4.4. Hipotesis H4 Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor Pengadaan Barang dan Jasa tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Secara deskriptif juga responden memiliki persepsi ragu-ragu bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012) dan Siswanto dan Rahayu (2010) yang menyatakan bahwa permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Pada saat ini di BPPK sudah terdapat Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terpusat sehingga dianggap lebih efektif dalam melakukan pengadaan. Namun dari jawaban responden pada pertanyaan terbuka terutama responden yang berada di daerah (Balai Diklat) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam PBJ adalah gagal lelang dikarenakan sepinya peminat peserta lelang di daerah sehingga lelang harus diulang.

4.4.5. Hipotesis H5 Faktor Permasalahan Koordinasi Dengan Instansi Lain berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Faktor koordinasi dengan instansi lain terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel koordinasi dengan instansi lain menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agus Sulaeman, Hamzah, dan Priyanto (2012) yang menyatakan bahwa semakin buruk sinkronisasi, keonsistensi, dan koordinasi dengan kementerian lain maka semakin buruk serapan anggaran.

Permasalahan yang terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain seperti rencana kegiatan sering tidak konsisten atau berubah-ubah karena perubahan kegiatan pada unit/lembaga lain. Dalam hal ini satker-satker di BPPK dalam menjalankan tugasnya bergantung pada unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan karena unit tersebut sebagai stakeholder BPPK. Dinamika organisasi stakeholder juga dapat berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan BPPK sehingga apabila koordinasi buruk maka sebaik apapun perencanaan yang dibuat akan selalu berubah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu satker BPPK yang stakeholdernya sering mengalami dinamika organisasi diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan dengan unit pengguna selama ini sudah cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah masalah kecepatan waktu dalam mengantisipasi perubahan. Masalah kecepatan waktu tersebut disebabkan perbedaan atap atau pucuk pimpinan sehingga apabila terjadi perubahan harus terlebih dahulu melewati jenjang atasan masing-masing satker sebelum dapat diputuskan.

Permasalahan lain adalah sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga serta buruknya

koordinasi antara suatu unit lembaga dengan lembaga lain di dalam proses perijinan dan pelaksanaan proyek. Sebagai contoh adalah izin proyek pembangunan konstruksi/gedung pada intansi tekait. Izin proyek tersebut harus ditelaah terlebih dahulu oleh instansi terkait dengan waktu yang tidak dapat diprediksi oleh sebab itu dapat menghambat jadwal perencanaan kegiatan yang telah dibuat oleh satker dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.4.6. Faktor-Faktor Lain

Beberapa faktor-faktor lain yang belum terdapat dalam penelitian ini dan mungkin mempengaruhi penyerapan anggaran satker BPPK berdasarkan hasil wawancara yaitu:

1. Perubahan Kebijakan

   Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka terkait faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran sebanyak 24 responden (30%) menyatakan bahwa perubahan kebijakan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pengeluaran secara nasional seperti penghematan, optimalisasi dan efisiensi. Seperti pada tahun 2014 Triwulan kedua terdapat kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang berpengaruh terhadap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Komitmen

   Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terbuka terkait faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran sebanyak 20 responden (25%) menyatakan bahwa Faktor komitmen dari pemimpin dan pelaksana kegiatan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Komitmen pemimpin satker (KPA) dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berpengaruh terhadap terselenggara atau tidaknya suatu kegiatan. Kemudian komitmen dari pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah direncanakan berpengaruh terhadap waktu pencairan anggaran. Selain itu juga komitmen pelaksana kegiatan untuk segera mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan berpengaruh terhadap pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satuan kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan koordinasi dengan instansi lain sebesar 65,2%. Sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
2. Faktor permasalahan dalam perencanaan terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan semakin buruk maka semakin rendah serapan anggaran.
3. Faktor permasalahan dalam pelaksanaan anggaran terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran satuan kerja.
4. Faktor permasalahan koordinasi dengan instansi lain terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK. Dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam koordinasi dengan instansi lain semakin tinggi maka semakin rendah serapan anggaran.
5. Faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan kebijakan, kinerja, dan permasalahan koordinasi dengan instansi lain terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker BPPK.

6. Berdasarkan pendapat responden terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yaitu faktor perubahan kebijakan baik kebijakan pengeluaran secara nasional dan faktor komitmen dari pemimpin dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang dapat dimanfaatkan oleh satker dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif yaitu :

1. Dalam hal perencanaan sebaiknya perencanaan kegiatan dipersiapkan secara matang mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan, anggaran yang dibutuhkan serta jadwal pelaksanaannya oleh para pelaksana kegiatan dan perencanaan kegiatan tersebut harus sejalan dengan perencanaan penganggarannya agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh anggaran yang belum tersedia atau harus menunggu anggaran yang perlu direvisi. Satker juga dapat memaksimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dalam meningkatkan kecepatan memperoleh informasi dari stakeholder sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan seperti penyebaran kuesioner analisis kebutuhan diklat kepada stakeholder secara online. Perubahan dalam perencanaan pelaksanaan anggaran harus selalu diupdate secara berkala, agar apabila terjadi kendala dapat segera diatasi dan tidak menghambat penyerapan anggaran satker.

2. Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran seperti keterlambatan penagihan sebaiknya pengelola keuangan di satker selain menegur penyedia barang dan jasa yang terlambat melakukan penagihan tetapi juga secara aktif mengedukasi para penyedia barang dan jasa mengenai format dokumen penagihan yang dipersyaratkan agar dokumen penagihan tidak bermasalah dan dapat langsung diproses untuk membuat surat permintaan pembayaran. Pengelola keuangan juga harus secara aktif mengedukasi pelaksana kegiatan dalam mekanisme pertanggungjawaban anggaran, agar setelah kegiatan selesai pelaksana kegiatan dapat segera memberikan dokumen terkait pencairan anggaran kepada pengelola keuangan.

3. Keterbatasan SDM dalam pengelola keuangan mengakibatkan penumpukan pekerjaan termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran. Dalam membagi pegawai baru atau mutasi pegawai sebaiknya mempertimbangkan beban kerja masing-masing satker, tidak membagi pegawai secara rata pada semua satker karena beban kerja yang dimiliki masing-masing satker berbeda.

4. Meningkatkan komitmen para pimpinan dan pelaksana kegiatan agar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan. Sebaiknya diadakan rapat rutin antara pengelola keuangan, perencana kegiatan serta pelaksana kegiatan untuk membahas perubahan rencana kegiatan, perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Jika ada perubahan rencana kegiatan dapat diinformasikan jauh hari sebelum kegiatan dimulai kepada pengelola keuangan agar anggaran yang diperlukan dapat disiapkan.

5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi rutin dengan intansi lain terutama stakeholder agar perubahan yang terjadi pada stakeholder dapat diantisipasi dan diketahui jauh-jauh hari. Dalam hal ini masing-masing pimpinan puncak dapat berperan lebih untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan.

6. Pengambian sampel responden yang lebih banyak dari semua satker terutama responden pimpinan satker (KPA) sebagai pengambil keputusan agar data yang digunakan dalam penelitian lebih menggambarkan kondisi satker yang sebenarnya.

7. Penambahan variabel dan indikator lain yang belum ada pada penelitian ini seperti sesuai dengan jawaban responden pada pertanyaan terbuka faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor kebijakan baik kebijakan secara nasional, instansi lain ataupun kebijakan para pimpinan satker serta faktor komitmen dari pimpinan dan pelaksana kegiatan.

8. Melakukan analisis yang berbeda atas data yang berasal dari BDK, Pusdiklat, STAN dan Sekretariat BPPK karena proses bisnis yang

berbeda dan permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran juga mungkin berbeda.

9. Menggunakan data capaian penyerapan anggaran masing-masing satker dalam analisis data penelitian dikaitkan dengan rencana kegiatan dan rencana penyerapan anggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Akadira, Tora. 2010. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Direktoret Jenderal Manajemen Dasar dan Menengah. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media Grup.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Jurnal

Sulaeman, Agus Sunarya; Andy Prasetiawan Hamzah dan Rame Priyanto. 2012. Penyerapan Anggaran Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhi. Jurnal BPPK Vol.4 tahun 2012 hal 18-37.

Karya Ilmiah

Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja K/L di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia

Supranggono, Linggo. 2009. Evaluasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Kementerian Negara/Lembaga. Skripsi. Tangerang Selatan: STAN

Naskah dari Internet

Schiavo-Campo, Salvatore, and Daniel Tommasi. 1999. Managing Government Expenditure. Manila: Asian Development Bank.

Siswanto, Adrianus Dwi dan Sri Lestari Rahayu. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. BKF Quick Research: tersedia pada website: http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-viewmobile.asp?id=20100920095054911292040

Sopian, Abu. 2014. Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diunduh dari http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/204_Strategi%20Pengadaan%20Barang.pdf pada tanggal 1 Agustus 2015

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2015. Struktur Organisasi BPPK. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/profil/struktur-organisasi diakses pada tanggal 25 April 2015

Naskah Produk Kebijakan

__________. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpes Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas. Pemerintah Republik Indonesia.

__________. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014. Pemerintah Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
Tabel Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Item	Indikator	Rujukan
Perencanaan (X_1)	Q1	Anggaran kegiatan diblokir	Hendris Herriyanto (2012) Agus Sunarya Sulaeman, Andy Prasetiawan Hamzah, Rame Priyanto (2012)
	Q2	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek	
	Q3	Kurangnya persiapan dalam pembuatan rencana/rancangan kegiatan	
	Q4	Rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB dan data pendukung	
	Q5	Selalu ada perubahan rencana/rancangan kegiatan saat kegiatan/proyek sedang berjalan	
	Q6	Adanya tambahan pagu karena ABT, kelebihan realisasi PNBP, tambahan/luncuran PHLN/PHDN, penerimaan hibah.	
	Q7	Pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam halaman 3 DIPA atau Rencana Anggaran Belanja (RAB)	
Pelaksanaan Anggaran (X_2)	Q8	SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan.	
	Q9	Salah dalam penentuan akun	
	Q10	Adanya addendum kontrak	
	Q11	DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan	
	Q12	Pemenuhan kelengkapan dokumen sering tidak tepat waktu	
	Q13	Keterlambatan proses penagihan dan pembayaran	
	Q14	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP	
Sumber Daya Manusia (X_3)	Q15	SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten	
	Q16	Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima	
	Q17	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami proses pengelolaan anggaran	
	Q18	Pemberian reward and punishment bagi para pengelola anggaran/satker tidak berjalan dengan baik	
	Q19	Pejabat/pegawai pengelola keuangan sering mengalami mutasi	
	Q20	Terdapat kebiasaan seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, mengerjakan pekerjaan di menit terakhir	
Pengadaan Barang dan Jasa (X_4)	Q21	Jadwal pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan.	Hendris Herriyanto (2012) Siswanto dan Rahayu (2010)
	Q22	Terlambat dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang.	
	Q23	SK Penunjukan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan	
	Q24	Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat	
	Q25	Permasalahan terkait pengadaan peralatan/mesin seperti peralatan/mesin yang diperlukan tidak tersedia/sulit didapat, peralatan/mesin yang dipesan terlambat datang, peralatan/mesin yang diterima tidak sesuai spesifikasi.	
	Q26	Proses penawaran, kontrak, dan pengadaan barang/jasa, dan kegiatan dilakukan sangat lambat dan berjenjang	
	Q27	Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar.	
Koordinasi dengan Sektor Lain (X_5)	Q28	Sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk anatar unit/lembaga	Agus Sunarya Sulaeman, Andy Prasetiawan Hamzah, Rame Priyanto (2012)
	Q29	Rencana Kegiatan sering tidak konsisten atau berubah-ubah karena perubahan kegiatan pada unit/lembaga lain	
	Q30	Sulitnya koordinasi antara suatu unit lembaga dengan lembaga lain di dalam proses perijinan dan pelaksanaan proyek	
Serapan Anggaran (Y)	Q31	Besarnya serapan anggaran sudah baik	
	Q32	Waktu serapan anggaran sudah baik sesuai dengan rencana	

Sumber : diolah dari landasan teori dan penelitian terdahulu

LAMPIRAN II
Statistik Deskriptif Jawaban Responden

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan	80	2.17	4.67	3.6135	.61868
Q1	80	1.0	5.0	3.375	1.2052
Q2	80	1.0	5.0	3.300	1.0838
Q3	80	1.0	5.0	3.725	1.0185
Q4	80	1.0	5.0	3.425	.9517
Q5	80	2.0	5.0	4.100	.7730
Q6	80	1.0	5.0	3.700	.8627
Q7	80	1.0	5.0	3.438	1.0043
Pelaksanaan Anggaran	80	2.00	4.67	3.6520	.52322
Q8	80	1.0	4.0	2.463	.9406
Q9	80	1.0	5.0	3.125	1.0599
Q10	80	1.0	5.0	3.800	.8175
Q11	80	1.0	5.0	4.038	.8026
Q12	80	1.0	5.0	3.763	.9174
Q13	80	1.0	5.0	3.713	.9572
Q14	80	1.0	5.0	3.475	.9543
SDM	80	2.00	4.75	3.5406	.66732
Q15	80	1.0	4.0	2.725	.8109
Q16	80	1.0	5.0	3.563	1.0655
Q17	80	1.0	5.0	3.450	.9665
Q18	80	2.0	5.0	3.750	.9209
Q19	80	1.0	5.0	2.963	.9473
Q20	80	1.0	5.0	3.400	.9359
PBJ	80	1.00	4.71	3.1463	.70197
Q21	80	1.0	5.0	3.100	.9085
Q22	80	1.0	5.0	3.175	.8682
Q23	80	1.0	5.0	2.900	.8802
Q24	80	1.0	5.0	3.175	1.0406
Q25	80	1.0	5.0	3.200	1.1069
Q26	80	1.0	5.0	3.250	.9209
Q27	80	1.0	5.0	3.225	.9933
Koordinasi	80	1.67	5.00	3.6083	.83451
Q28	80	2.0	5.0	3.775	.9137
Q29	80	1.0	5.0	3.463	.9539
Q30	80	2.0	5.0	3.588	.9506
Serapan Anggaran	80	2.00	5.00	3.4813	.64848
Q31	80	1.0	5.0	3.563	.8692
Q32	80	1.0	5.0	3.100	.9757

LAMPIRAN III
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

Item	Indikator	r Tabel (df=78)	r Hitung	Validitas
Variabel Perencanaan (X_1)				
Q1	Anggaran kegiatan diblokir	0.220	0.576	Valid
Q2	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek	0.220	0.583	Valid
Q3	Kurangnya persiapan dalam pembuatan rencana/rancangan kegiatan	0.220	0.769	Valid
Q4	Rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan data pendukung	0.220	0.680	Valid
Q5	Selalu ada perubahan rencana/rancangan kegiatan	0.220	0.472	Valid
Q6	Adanya tambahan pagu	0.220	0.517	Valid
Q7	Pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam halaman 3 DIPA	0.220	0.697	Valid
Variabel Pelaksanaan Anggaran (X_2)				
Q8	SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan terlambat ditetapkan	0.220	0.213	Tidak Valid
Q9	Salah dalam penentuan akun	0.220	0.728	Valid
Q10	Adanya addendum kontrak	0.220	0.704	Valid
Q11	DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan	0.220	0.460	Valid
Q12	Pemenuhan kelengkapan dokumen sering tidak tepat waktu	0.220	0.644	Valid
Q13	Keterlambatan proses penagihan dan pembayaran	0.220	0.552	Valid
Q14	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP	0.220	0.629	Valid
Variabel Sumber daya Manusia (SDM) (X_3)				
Q15	SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten	0.220	0.490	Valid
Q16	Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko	0.220	0.680	Valid
Q17	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami proses pengelolaan anggaran	0.220	0.682	Valid
Q18	Pemberian reward and punishment tidak berjalan dengan baik	0.220	0.669	Valid
Q19	Pejabat/pegawai pengelola keuangan sering mengalami mutasi	0.220	0.554	Valid
Q20	Terdapat kebiasaan seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin	0.220	0.477	Valid
Variabel Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (X_4)				
Q21	Jadwal pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis	0.220	0.711	Valid
Q22	Terlambat dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang.	0.220	0.717	Valid
Q23	SK Penunjukan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan	0.220	0.677	Valid
Q24	Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat	0.220	0.710	Valid
Q25	Permasalahan terkait pengadaan peralatan/mesin	0.220	0.788	Valid
Q26	Proses penawaran, kontrak, dan pengadaan barang/jasa, dan kegiatan dilakukan sangat lambat dan berjenjang	0.220	0.790	Valid
Q27	Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	0.220	0.717	Valid
Variabel Koordinasi dengan Instansi Lain (X_5)				
Q28	Sinkronisasi kegiatan proyek yang buruk antar unit/lembaga	0.220	0.846	Valid
Q29	Rencana Kegiatan sering tidak konsisten atau berubah-ubah	0.220	0.930	Valid
Q30	Sulitnya koordinasi antara suatu unit lembaga	0.220	0.889	Valid
Variabel Serapan Anggaran (Y)				
Q31	Besarnya serapan anggaran sudah baik	0.220	0.892	Valid
Q32	Waktu serapan anggaran sudah baik sesuai dengan rencana	0.220	0.915	Valid

Sumber: diolah dari data primer dengan aplikasi SPSS 21